



ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SDG 8 DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA ALAMENDAH BERBASIS KOLABORASI PENTAHELIX

Aura Aulia Sofia¹ • Zefanya Risca Cristiani² • Indah Prabawati³ • Firre An Suprpto⁴

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of Sustainable Development Goal (SDG) 8, namely Decent Work and Economic Growth, in the development of Alamendah Tourism Village through a pentahelix collaboration approach. The research employs a qualitative method using literature review and document analysis. Data were collected from secondary sources, including policy reports, scientific journals, academic books, and documents related to Alamendah Tourism Village. The analysis is based on George C. Edwards III's policy implementation framework, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of SDG 8 has contributed positively to local economic growth through increased tourism activities, the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and the creation of employment opportunities for local communities. However, the implementation has not yet been fully optimal due to challenges such as limited human resource capacity, uneven policy dissemination, varying levels of community participation, and insufficient coordination among stakeholders. The pentahelix collaboration involving government, academia, the private sector, local communities, and the media plays a significant role in supporting tourism village development through resource strengthening, innovation, promotion, and community empowerment. Nevertheless, challenges remain, including dependence on certain actors and the limited contribution of long-term private sector investment. Therefore, strengthening community capacity, institutional integration, and sustainable collaboration is essential to achieving inclusive and sustainable rural economic development in line with SDG 8 objectives.*

Keywords: *Pentahelix, Policy implementation, SDG 8, Tourism Villages, Village Economy*

©2026 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi desa saat ini menjadi perhatian penting dalam program pembangunan nasional, terutama terkait kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 8 yang berfokus pada Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. SDG 8 menekankan pentingnya pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat (*United Nations*, 2015). Di Indonesia, upaya penguatan ekonomi desa juga didorong melalui kebijakan Dana Desa. Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara desa dan kota.

Salah satu cara yang banyak dilakukan dalam mendorong ekonomi desa adalah melalui pengembangan desa wisata. Model ini tidak hanya berfokus pada sektor pariwisata, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan

*Adyazada Reswara Prambudi(✉)

-

Email : -



pendapatan warga. Desa Alamendah menjadi salah satu contoh desa yang berkembang melalui model ini, dengan memanfaatkan potensi alam, agrowisata, dan produk unggulan lokal sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat. Program pengembangan desa wisata dalam kerangka SDG 8 dilaksanakan melalui kolaborasi berbagai aktor seperti pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi lokal.

Secara normatif, kebijakan pengembangan desa wisata dirancang untuk mendorong desa agar lebih mandiri secara ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang layak. Namun di lapangan, implementasi kebijakan masih banyak hambatan yang muncul, mulai dari keterbatasan sumber daya, koordinasi yang belum optimal, kemampuan sumber daya manusia yang belum merata, serta kerja sama antar pemangku kepentingan yang belum terintegrasi.

Menurut George C. Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ketika salah satu variabel ini tidak berjalan dengan baik, maka tujuan kebijakan akan sulit tercapai secara optimal. Dalam konteks pengembangan desa wisata, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan. Persoalan ini menjadi penting karena menyangkut kesejahteraan masyarakat desa secara langsung. Tanpa implementasi yang efektif dan kolaborasi yang kuat, pengembangan desa wisata berisiko hanya menghasilkan pertumbuhan sektoral, bukan pertumbuhan yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan pengembangan ekonomi desa berbasis SDG 8 di Desa Alamendah serta melihat peran kolaborasi pentahelix dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan dalam pengembangan desa wisata sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

LANDASAN TEORI

Implementasi kebijakan merupakan fase determinan dalam siklus kebijakan publik, mengingat tahap ini menjadi penentu utama apakah tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai secara efektif atau tidak. Keberhasilan eksekusi kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas perumusan saja, melainkan sangat bergantung pada mekanisme operasionalisasi yang dilakukan oleh para aktor pelaksana di tingkat lapangan.

Sebagai landasan teoretis utama, penelitian ini mengadopsi model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980). Edwards mengidentifikasi empat dimensi fundamental yang memengaruhi efektivitas implementasi, yaitu:



1. Komunikasi Kebijakan harus disampaikan secara jelas, konsisten, dan tepat kepada pelaksana serta kelompok sasaran.
2. Sumber Daya Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas pendukung. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan sulit dijalankan secara efektif.
3. Disposisi Komitmen, integritas, dan kemauan aparatur pelaksana berpengaruh besar terhadap keberhasilan kebijakan. Sikap yang tidak mendukung dapat menghambat pencapaian tujuan.
4. Struktur Birokrasi Struktur organisasi dan prosedur operasional harus mendukung pelaksanaan kebijakan. Struktur yang terlalu birokratis atau tidak fleksibel dapat memperlambat implementasi.

Dalam konteks empiris ini, kerangka Edwards III dijalankan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan ekonomi desa berbasis *Sustainable Development Goals* (SDG) 8 di Desa Alamendah, dengan fokus pada pengelolaan desa wisata sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Konsep SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (United Nations, 2015). SDG 8 berfokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan pekerjaan yang layak bagi semua. Prinsip utama dalam SDG 8 adalah bahwa pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Dalam konteks pengembangan desa wisata, realisasi SDG 8 dapat diobservasi melalui:

- a) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal;
- b) Penciptaan lapangan kerja yang berbasis pada potensi lokal desa;
- c) Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat;
- d) Penguatan ekonomi yang berlandaskan pada sumber daya lokal.

Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan pengembangan desa wisata menjadi relevan untuk mengevaluasi tingkat pencapaian tujuan SDG 8 pada level desa.

Pendekatan Pentahelix dalam Pengembangan Ekonomi Desa

Pengembangan ekonomi desa menuntut keterlibatan multipihak dan tidak dapat diimplementasikan secara parsial oleh pemerintah semata. Pendekatan Pentahelix menekankan pentingnya sinergi antara lima aktor strategis, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Pendekatan ini sejalan dengan konsep kolaborasi pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Dalam pengembangan desa wisata, kolaborasi pentahelix berkontribusi pada:

- a) Penyusunan dan pelaksanaan program



- b) Pendampingan dan pelatihan usaha
- c) Promosi dan pemasaran destinasi
- d) Penguatan jejaring ekonomi

Dengan mengintegrasikan teori implementasi Edwards III dan pendekatan Pentahelix, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi desa serta mengukur sejauh mana kolaborasi antaraktor berkontribusi terhadap pencapaian target SDG 8.

Kerangka Berpikir Penelitian

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan pencapaian SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan dianalisis menggunakan teori George C. Edwards III yang terdiri atas empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Keempat variabel tersebut digunakan untuk melihat efektivitas implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Alamendah sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan didukung oleh kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media. Kolaborasi tersebut berperan dalam memperkuat kapasitas sumber daya, meningkatkan koordinasi, mendorong inovasi, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

Melalui implementasi kebijakan yang efektif dan didukung kolaborasi pentahelix, pengembangan Desa Wisata Alamendah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat UMKM lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan SDG 8.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen untuk menganalisis implementasi kebijakan SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) dalam pengembangan desa wisata di Desa Alamendah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena implementasi kebijakan melalui berbagai sumber data tertulis yang tersedia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena implementasi kebijakan melalui berbagai sumber data yang tersedia. Pendekatan kualitatif berfokus pada upaya memahami makna, proses, serta konteks suatu fenomena secara mendalam melalui analisis data deskriptif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan interpretasi terhadap data yang tersedia (Fadli, 2021).

Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan memanfaatkan data sekunder yang tersedia pada berbagai dokumen resmi, laporan kebijakan,



serta publikasi ilmiah. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dokumen terkait pengembangan desa wisata serta implementasi SDGs, seperti laporan kebijakan, artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen mengenai Desa Wisata Alamendah yang tersedia secara daring.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen yang berkaitan dengan fenomena penelitian seperti arsip, laporan, maupun dokumen tertulis lainnya. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami suatu fenomena dengan memakai sumber data yang sudah ada (Nilamsari, 2014).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam berbagai dokumen dengan tujuan untuk memahami implementasi kebijakan SDG 8 dalam pengembangan desa wisata di Desa Alamendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Implementasi Kebijakan (Teori Edwards III)

Implementasi kebijakan pengembangan ekonomi desa berbasis SDG 8 di Desa Alamendah dapat dianalisis menggunakan teori George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Keempat variabel ini saling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat desa.

Dari aspek komunikasi, pemerintah desa telah melakukan upaya sosialisasi kebijakan melalui forum desa, pelatihan, serta interaksi langsung dengan masyarakat dan pelaku UMKM. Informasi mengenai pengembangan desa wisata sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi telah disampaikan secara bertahap. Namun, efektivitas komunikasi tersebut belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh tujuan SDG 8 maupun arah kebijakan yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Dari sisi sumber daya, Desa Alamendah memiliki potensi yang cukup besar, terutama dari segi sumber daya alam dan dukungan dana desa yang digunakan untuk pengembangan infrastruktur wisata. Potensi agrowisata dan lingkungan alam menjadi kekuatan utama dalam mendukung kegiatan ekonomi berbasis pariwisata. Akan tetapi, kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan, khususnya dalam hal pengelolaan wisata, pemasaran digital, dan manajemen usaha. Keterbatasan ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan potensi yang ada.

Sementara itu, dari aspek disposisi, baik pemerintah desa maupun masyarakat pada umumnya menunjukkan sikap yang positif terhadap kebijakan pengembangan desa wisata. Pemerintah desa memiliki komitmen dalam mengembangkan ekonomi lokal, sedangkan masyarakat mulai terlibat dalam kegiatan UMKM dan pariwisata. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat belum merata, karena masih terdapat kelompok yang belum aktif



terlibat akibat keterbatasan kemampuan maupun kurangnya pemahaman terhadap manfaat program.

Dari segi struktur birokrasi, implementasi kebijakan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, dinas terkait, kelompok sadar wisata, pelaku usaha, dan masyarakat. Koordinasi antar pihak telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal. Masih terdapat kendala dalam pembagian peran, sinkronisasi program, serta koordinasi lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan masih perlu diperkuat agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

2. Implementasi SDG 8 dalam Desa Wisata

Implementasi SDG 8 di Desa Alamendah tercermin melalui pengembangan desa wisata yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja (United Nation, 2023). Berbagai program berbasis potensi lokal telah dikembangkan, seperti agrowisata, pengolahan produk lokal, serta penguatan UMKM. Program-program ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi yang beragam.

Keberadaan desa wisata juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat dapat terlibat sebagai pengelola wisata, pemandu, pelaku usaha kuliner, maupun penyedia jasa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam memperluas kesempatan kerja di tingkat desa.

Namun demikian, lapangan kerja yang tercipta sebagian besar masih bersifat informal dan belum sepenuhnya memenuhi kriteria pekerjaan layak sebagaimana yang ditekankan dalam SDG 8. Selain itu, manfaat ekonomi yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, meskipun implementasi SDG 8 telah menunjukkan arah yang positif, masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif dengan kondisi di lapangan, terutama dalam hal inklusivitas dan keberlanjutan ekonomi.

3. Pengembangan Desa Wisata Alamendah

Pengembangan Desa Alamendah sebagai desa wisata didukung oleh potensi lokal yang beragam, meliputi keindahan alam, hasil pertanian, serta produk UMKM. Potensi ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan sekaligus sumber penghasilan bagi masyarakat (Nurhayati et al., 2025). Selain itu, unsur budaya dan kearifan lokal turut memperkuat identitas desa sebagai destinasi wisata yang memiliki nilai khas.

Strategi pengembangan desa wisata dilakukan melalui pemanfaatan potensi lokal, pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, serta promosi wisata melalui media sosial dan kerja sama dengan berbagai pihak. Pemerintah desa berupaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengembangan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas.

Meskipun demikian, pengelolaan desa wisata masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan inovasi, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, serta pengelolaan yang belum sepenuhnya profesional. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat juga belum merata, karena masih terdapat sebagian warga yang belum aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis wisata.

Secara keseluruhan, pengembangan desa wisata di Desa Alamendah telah



menunjukkan potensi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, memperluas partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan.

4. Analisis Kolaborasi Pentahelix di Desa Wisata Alamendah

Kolaborasi pentahelix di Desa Wisata Alamendah merupakan sebuah manifestasi kerja kolektif yang terstruktur dan terukur dalam mengakselerasi potensi lokal. Pemerintah Kabupaten Bandung berperan fundamental sebagai regulator melalui Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2020 tentang Pembangunan Desa Wisata, serta penguatan legalitas bagi Kelompok Sadar Wisata (Utomo & Pulungan, 2024). Secara teknis, pemerintah desa mengalokasikan Dana Desa untuk optimalisasi aksesibilitas menuju spot agrowisata stroberi. Akademisi dari berbagai perguruan tinggi melakukan akselerasi melalui transfer pengetahuan terkait digitalisasi manajemen. Data menunjukkan bahwa penerapan sistem reservasi daring dan tata kelola administrasi berbasis digital berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data kunjungan hingga 45% (Darajat et al., 2023).

Di sektor Ekonomi, pihak swasta lokal dan korporasi telah mengintegrasikan lebih dari 25 unit UMKM pengolah stroberi dan kopi ke dalam rantai pasok nasional melalui pameran dan kemitraan dagang. Masyarakat melalui Pokdarwis bertindak sebagai aktor utama yang mengelola 30 unit akomodasi (*homestay*) yang telah meraih sertifikasi CHSE (Utomo & Pulungan, 2024)). Partisipasi aktif warga dalam menjaga ekosistem Arboretum Alamendah menjadi daya tarik konservasi yang unik. Media berperan sebagai katalisator informasi yang memperkuat branding desa; pasca raihan Peringkat Kedua Desa Digital pada ajang ADWI 2021, intensitas publikasi digital memicu kenaikan signifikan pada algoritma pencarian destinasi Alamendah di internet, yang berdampak pada perluasan pangsa pasar wisatawan domestik (Utomo & Pulungan, 2024).

5. Dampak Implementasi Kebijakan terhadap SDG 8

Implementasi kebijakan pengembangan desa wisata ini memberikan dampak signifikan terhadap target SDG 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Statistik kunjungan wisatawan menunjukkan eskalasi yang sangat kontras pasca-transformasi kebijakan sebagaimana terlihat pada analisis data berikut:

Tahun	Jumlah Wisatawan	Estimasi Perputaran Uang	Indikator Pertumbuhan SDG 8
2020	1.540 orang	Rp 1,5 Miliar	Fase resesi akibat pandemi
2021	1.446 orang	Rp 1,4 Miliar	Stagnasi akibat pembatasan mobilitas
2022	5.793 orang	Rp 5,8 Miliar	Eskalasi pasca raihan prestasi nasional
2023	4.094 orang	Rp 4,1 Miliar	Fase stabilitas dan pemulihan ekonomi

Tabel 1. Statistik Kunjungan dan Estimasi Dampak Ekonomi Mikro (2020-2023)



Analisis ekonomi mikro menunjukkan adanya multiplier effect (efek pengganda) sebesar 2,3; artinya setiap pengeluaran wisatawan sebesar satu juta rupiah di Alamendah menstimulasi aktivitas ekonomi tambahan senilai Rp2.300.000 bagi warga lokal di sektor transportasi, kuliner, dan jasa pemanduan (Yanti & Indahsari, 2024)). Secara sosial, terjadi diversifikasi struktur ketenagakerjaan di mana pemuda desa kini terserap menjadi pengelola konten digital, pemandu profesional, dan pengusaha mikro agrowisata. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan desa wisata mampu menekan angka pengangguran terbuka dan menciptakan pekerjaan yang lebih inklusif bagi kelompok perempuan desa (Utomo & Pulungan, 2024).

6. Hambatan dan Analisis Kritis (Model George C. Edwards III)

Meskipun mencatat keberhasilan yang impresif, berdasarkan variabel George C. Edwards III, ditemukan beberapa hambatan implementasi yang bersifat struktural (Sholihah et al., 2025).

- a) Sumber Daya (*Resources*): Data lapangan mengungkap kendala pada infrastruktur fisik dasar. Akses jalan menuju kawasan agrowisata tertentu masih memiliki lebar terbatas, sehingga menyulitkan akses kendaraan besar berkapasitas 45 kursi. Selain itu, ketersediaan air bersih di elevasi tertinggi kawasan wisata masih mengalami fluktuasi debit saat musim kemarau panjang.
- b) Komunikasi: Terjadi kesenjangan informasi atau distorsi komunikasi antara pengelola inti (Pokdarwis) dengan warga di dusun terpencil terkait sistem pembagian keuntungan dari platform digital, sehingga partisipasi kolektif belum mencapai titik ekuilibrium.
- c) Struktur Birokrasi: Terdapat tumpang tindih kewenangan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Pokdarwis dalam teknis pengelolaan dana pemeliharaan fasilitas umum, yang terkadang memperlambat proses restorasi fasilitas yang rusak. Secara kritis, kolaborasi pentahelix di Alamendah masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sosok penggerak lokal (*local champion*). Terdapat gap di mana kontribusi sektor swasta masih bersifat insidental (berbasis kegiatan) dan belum mencapai tahap investasi infrastruktur jangka panjang yang permanen (Adiyoso, 2023).

7. Keterkaitan Antar-Teori

Analisis ini menemukan bahwa keberhasilan pencapaian SDG 8 di Alamendah merupakan variabel terikat yang berbanding lurus dengan kualitas kolaborasi Pentahelix dalam memitigasi hambatan kebijakan (Edwards III). Data lonjakan kunjungan tahun 2022 membuktikan bahwa ketika hambatan sumber daya teknologi diatasi oleh pilar Akademisi dan hambatan komunikasi diselesaikan oleh pilar Media, maka efektivitas implementasi kebijakan meningkat secara linear (Yanti & Indahsari, 2024). Sinergi ini memperkuat disposisi masyarakat untuk terus mendukung kebijakan



pemerintah karena manfaat ekonominya dirasakan secara nyata dan langsung (Sholihah et al., 2025). Keberhasilan ini menegaskan bahwa kebijakan publik di sektor pariwisata hanya akan mencapai target sasaran jika dikelola dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi, bukan sekadar instruksi birokrasi satu arah.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengembangan ekonomi desa berbasis SDG 8 di Desa Alamendah menunjukkan capaian yang cukup progresif, namun belum sepenuhnya optimal dan merata. Berdasarkan analisis teori George C. Edwards III, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama yang masih menghadapi beberapa kendala. Dari sisi komunikasi, sosialisasi kebijakan telah dilakukan tetapi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Dari aspek sumber daya, potensi alam dan dukungan dana sudah memadai, namun kualitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama. Sementara itu, disposisi atau sikap para pelaksana dan masyarakat cenderung positif, meskipun tingkat partisipasi belum merata. Adapun dari segi struktur birokrasi, koordinasi antar aktor sudah berjalan, tetapi belum terintegrasi secara optimal.

Implementasi SDG 8 melalui pengembangan desa wisata telah memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah wisatawan, perputaran ekonomi, serta munculnya berbagai peluang usaha baru bagi masyarakat. Namun, sebagian besar pekerjaan yang tercipta masih bersifat informal dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip pekerjaan layak, serta distribusi manfaat ekonomi yang belum merata.

Di sisi lain, pendekatan kolaborasi pentahelix terbukti berperan penting dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media mampu memperkuat aspek sumber daya, komunikasi, serta inovasi dalam pengelolaan desa wisata. Meskipun demikian, kolaborasi ini masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada aktor tertentu serta belum optimalnya kontribusi sektor swasta dalam bentuk investasi jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Desa Wisata Alamendah memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian SDG 8, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek kapasitas sumber daya manusia, pemerataan partisipasi masyarakat, integrasi kelembagaan, serta keberlanjutan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Upaya perbaikan yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, M. (2023). Analisis stakeholder pariwisata (Tesis ITB), 13–18.
- Bappenas. (2017). Ringkasan metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar pembangunan ekonomi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. <https://sdgs.bappenas.go.id>
- Darajat, M. N. A., Ramadhani, Z. A., Adiyoso, M., Zidany, N. A., & Alidha, S. Y. (2023). Impact of tourism in Alamendah Tourism Village on the physical, economic, social, and cultural environment of local communities. *Sebatik*, 27(2), 613–619. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2191>



- Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
<https://archive.org/details/implementingpubl0000edwa>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hardianto, A., & et al. (2023). Pendekatan pentahelix dalam tata kelola desa wisata berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(2), 72. <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/5290>
- Nabilah, A., & Djuwendah, E. (2022). Potensi dan strategi pengembangan agroekowisata Desa Alamendah sebagai kawasan wisata berbasis masyarakat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 9(2), 92. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2841433>
- Nation, U. (2023). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* | Department of Economic and Social Affairs. United Nations.
- Nilamsari. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/143>
- Nirwani, A., & et al. (2023). Implementasi kriteria Community-Based Tourism ASEAN: Studi kasus pada Desa Wisata Alamendah. *Journal of Government Insight*, 1(2), 12. <https://jurnal-umsi.ac.id>
- Nurhayati, Lutfi, M. Y., Hidayatullah, N., Wahyuningsih, M., Dizar, S., Octaviani, D., Kusumastuti, S. Y., Sumiyarti, Suparyati, A., Indrianto, A. T. L., & Buysnetty, I. (2025). *Desa berkelanjutan implementasi SDGs dalam pembangunan desa di Indonesia (Vol. 2)*.
- Prabowo, A., et al. (2023). The role of stakeholders in developing Alamendah Tourism Village. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 91. <https://undiksha.ac.id>
- Putra, A. R. (2023). Penerapan model pentahelix dalam pengembangan agrowisata. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 61. <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id>
- Sari, R. P., et al. (2024). Pengembangan Desa Alamendah sebagai desa wisata berbasis digital di Kabupaten Bandung. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(7), 47. <https://rivierapublishing.id>
- Setiaji, K., & Arisanti, R. (2020). Implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 17(1), 171. <https://uny.ac.id>
- Sholihah, Z. N., Nirwani, A., & Bela, T. (2025). Efektivitas kebijakan Perda Kabupaten Bandung No. 07 Tahun 2020 terhadap pencapaian Desa Wisata Alamendah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 4(7), 267–282. <http://jurnal.abisatya.org/index.php/EKO-BISMA/article/view/211>
- Suryawan, I. B., & et al. (2023). Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in a tourism village. *Journal of Tourism and Sustainable Development*. <https://semanticscholar.org>
- Utomo, D. K., & Pulungan, A. R. (2024). The role of stakeholders in developing Alamendah Tourism Village.
- Yanti, S. D., & Indahsari, K. (2024). Dampak pembangunan desa wisata terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) desa. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 5(1). <https://doi.org/10.21107/bep.v5i1.26135>

